

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
(Studi Kasus Pada Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga
Kabupaten Lingga)**

**HEPRI CANDRA
&
FEBRI YULIANI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. 28293 Telp/Fax
(0761) 63277
Jalan Taman Karya Perum.Griya Indah Tampan, Pekanbaru.
bunk.hepri@yahoo.co.id Telp: (085767926621)

ABSTRACT

The background of this research is the importance of community participation in development and the level of community participation in the research area is still low. Participation rates are still low is only identified based on the level of public attendance at meetings and implementation of development activities. The research was conducted in order to identify the authors re-levels of community participation in participatory activities at the sites. Formulation of the problem in this research is the "Public Participation in the Implementation of the Rural Infrastructure Development Program (Case Study on the Rural Land District Panggak Linga Linga District)" with the aim of research to "Knowing the Implementation of Public Participation in Rural Infrastructure Development Program (Case Study on the Rural Land District Panggak Linga Linga District). "method used is descriptive qualitative method, the analysis seeks to provide a detailed description based on the fact that some in the field of community participation in the implementation of rural infrastructure development program. The data used in this study consisted of primary data is data obtained directly from the field or place of study through interviews with the Village Head, Public Citizen, Head of Youth Development and Chairman. Then the Secondary data is data obtained from documents that are related to the research problem. Data collection techniques include: observation, interviews, and library research. Involving all citizens of the Village Land District Panggak Linga Linga District. Results of this study are Public Participation in the Implementation of Rural Infrastructure Development Program (Case Study on the Rural Land District Panggak Linga Linga District) said "less" because people are not fully capable of giving their participation in development, this is due to the condition of the people have an average income as orchard farmers, the public perception that development is the task of the government apparatus and the only village is still very dependent on government assistance, and the reason because there are other jobs that are preferred the day-to-day needs.

Keywords: Participation, Community, Development.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas jelaslah bahwa, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama melalui pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena pembangunan nasional adalah merupakan pembangunan dari seluruh rakyat Indonesia dan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang meliputi bidang-bidang kehidupan, antara lain : fisik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) baik diperkotaan maupun dipedesaan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah melaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu pembangunan nasional secara bertahap dan berencana dalam segala bidang baik material maupun spiritual.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Taliziduhu Ndraha (dalam Kunarjo 2002:63) dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain : Partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan Partisipasi dalam menerima hasil.

Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik *bottom-up*, demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat adalah dalam bentuk partisipasi atau gotong-royong dan akan berhasil apabila diberikan stimulan yang cukup dengan arah pembangunan yang jelas, seperti strategi pembangunan global harus diarahkan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, kepingangan pendapat, pengangguran, dan ketergantungan yang meliputi sebahagian besar

penduduk pedesaan, demikian juga halnya dengan penduduk Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Desa Panggak Darat adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, sebagai sebuah desa yang sedang berkembang, apalagi berada jauh dari ibukota kecamatan, di Desa Panggak Darat juga terdapat objek wisata yang sangat menarik seperti air terjun, banyak pembangunan infrastruktur desa yang dibutuhkan sebagai pendorong untuk meningkatkan ekonomi maupun pendidikan bagi masyarakat desa sehingga kesejahteraan masyarakat di kalangan Desa Panggak Darat bisa tercapai. Di Desa Panggak Darat mata pencaharian penduduk rata-rata sebagai petani kebun. Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan desa sangat dibutuhkan swadaya dari anggota masyarakat yaitu kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk uang maupun benda yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat yang dianut adalah merupakan pembangunan partisipatif, dimana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju modernitas yang diharapkan dapat mengimbangi lajunya pembangunan diperkotaan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat atau Kepala Desa dengan masyarakat yang berada dilingkungannya, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, dalam suatu pembangunan infrastruktur partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena partisipasi bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu pembangunan yang dilakukan. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jelaslah bahwa, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama melalui pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

Dengan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan kajian untuk dijadikan pengetahuan bagi peneliti lain dan aparat pemerintah desa Panggak Darat agar dapat merespon dengan baik apa yang diharapkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Dalam Perencanaan Termasuk Pengambilan Keputusan

Untuk melakukan suatu perencanaan pembangunan sangatlah penting sebab dari perencanaan tersebut sudah bisa ditentukan apa-apa saja yang diperlukan, berapa biaya yang dikeluarkan, bagaimana bentuk pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dan apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan itu.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program yang akan dilaksanakan.

Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya dan untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan, dengan demikian akan lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Panggak Darat, Kepala Urusan Pemerintahan kantor desa Panggak Darat dan beberapa warga masyarakat desa Panggak Darat dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ditinjau dari aspek penetapan rencana pembangunan hingga sampai ketahap pengambilan keputusan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ide maupun saran dapat dikatakan kurang, karena masih ada masyarakat yang tidak bisa turut serta dalam musyawarah dikarenakan ada urusan yang lebih diutamakan, yaitu mereka harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena merupakan faktor utama penentu untuk menentukan rencana pembangunan hingga pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan perencanaan hingga pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta atau menghadiri musyawarah (rapat) yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dapat

dikatakan kurang. Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam hal ini tidak hanya untuk menghadiri musyawarah atau rapat desa saja tetapi juga turut berpengaruh didalam menentukan perencanaan program pembangunan termasuk pengambilan keputusan yang akan disetujui bersama-sama.

Pembangunan yang terencana sesuai dengan tujuan, sasaran dan target merupakan tahap awal yang penting, karena mengingat keragaman tujuan dan keinginan masyarakat dalam program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan merupakan langkah awal yang menunjukkan tidak adanya batasan kepada masyarakat unyuk ikut serta memberikan kritik dan saran dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat mencegah timbulnya pandangan masyarakat bahwa pembangunan merupakan tugas aparat pemerintah desa saja dan berakibat pada kurangnya ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi.

B. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Operasional Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, karena memang pembangunan infrastruktur desa disini sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat desa, yang sifatnya sukarela, bukan paksaan bagi orang yang berperan serta.

Tidak bisa dipastikan juga bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam mempersiapkan suatu rencana pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakat akan berpartisipasi dalam tahap-tahap berikutnya. Hal tersebut karena partisipasi pada tahap pelaksanaan membutuhkan biaya dan pengorbanan yang lebih tinggi.

Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan, partisipasi masyarakat disini sangat dituntut lebih dalam segala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan sangat berat, dimana masyarakat diharapkan mampu memberikan partisipasi mereka seoptimal atau sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih atau ekstra baik berupa uang, tenaga dan bahan dari pembangunan guna memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Panggak Darat dan beberapa warga masyarakat desa Panggak Darat dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Panggak Darat ditinjau dari aspek pelaksanaan operasional pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa materi dan tenaga dikatakan kurang.

Padahal dalam hal ini partisipasi mereka sangat dibutuhkan untuk menunjang atau menentukan keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan.

Selanjutnya untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Panggak Darat, masyarakat diharapkan bisa untuk meningkatkan bentuk partisipasi didalam pelaksanaan operasional pembangunan baik berupa swadaya masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berlangsung atau tenaga dan sumbangan berupa bahan-bahan didalam pelaksanaan pembangunan guna menunjang kelancaran didalam pelaksanaan pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan infrastruktur di Desa Panggak Darat ini sangat ditentukan dari partisipasi mereka sepenuhnya dan merupakan tanggung jawab masyarakat desa sepenuhnya.

C. Partisipasi Dalam Pemeliharaan Hasil-hasil Pembangunan

Pemeliharaan hasil-hasil dari pembangunan sangatlah penting karena bisa membuat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan bisa bertahan dengan lama dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat untuk menjaga, merawat, serta memanfaatkan dengan baik hasil-hasil dari pembangunan yang telah dilakukan.

Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapat, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya, dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan, yang menjadikan masyarakat itu mandiri dan mampu untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa warga masyarakat desa Panggak Darat dapat diketahui bahwa telah adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di desa Panggak Darat dengan sebaik-baiknya. Warga masyarakat telah ikut serta dalam menjaga, merawat, serta memanfaatkan hasil-hasil dari pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Pada hakikatnya pembangunan desa memang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa merasakan atau menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang dilakukan tanpa terkecuali, bukan untuk sebagian masyarakat saja. Meskipun didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mungkin partisipasi masyarakat kurang atau sulit didapatkan, tetapi didalam pemanfaatan

dari hasil pembangunan harus bisa dirasakan atau dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Desa Panggak Darat sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan tentunya diharapkan agar bisa dimanfaatkan dan bermanfaat dengan sebaik-baiknya agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi, karena memang partisipasi masyarakat merupakan suatu proses perubahan yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Panggak Darat masih belum seperti yang diharapkan atau kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya dari beberapa indikator yaitu : partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pelaksanaan operasional program pembangunan. Sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa ini berdampak pada kurang menunjang pelaksanaan program pembangunan desa.

Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Panggak Darat antara lain : a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat/uang dikarenakan faktor ekonomi, sebab kondisi masyarakat rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani kebun. b. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam musyawarah/rapat dan gotong royong dalam pelaksanaan program pembangunan dengan alasan karena masih ada pekerjaan lain yang diutamakan yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. c. Adanya anggapan masyarakat bahwa pembangunan desa adalah merupakan tugas aparat pemerintah desa saja dan masyarakat masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah, ini dikarenakan kemampuan masyarakat masih kurang untuk ikut serta dalam musyawarah/rapat dan gotong royong dalam pelaksanaan program pembangunan.

SARAN

Tujuan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan partisipatif adalah mensejahterakan masyarakat dan bukan bertujuan membantu pemerintah dalam penyediaan dana. Tentunya dari hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu penentu besarnya kontribusi masyarakat, tidak menjadikan bahwa desa yang harus dibangun lebih dulu adalah desa dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena tingkat

partisipasinya juga tinggi. Seharusnya malah sebaliknya, agar pemerataan pembangunan dapat terasa.

Kepada seluruh masyarakat Desa Panggak Darat, diharapkan untuk lebih meningkatkan partisipasinya (keikutsertaannya) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Kepada Pemerintah Desa Panggak Darat, diharapkan agar mempengaruhi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur khususnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan kemudian Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor waktu yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut menentukan partisipasinya. Untuk itu mungkin perlu dirubah mekanisme yang berbeda pada taraf pelaksanaan pembangunan.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga untuk lebih memperhatikan kebutuhan serta kondisi wilayahnya, seperti pembangunan-pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Ndraha T, 1994, *Kepemimpinan yang efektif*, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Mubyarto, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.